

S  
336.207  
Dim  
A  
2013

Record : 22548  
Reg : 23032

# ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH PEMERINTAH

KOTA PALEMBANG



Skripsi Oleh:

**DINI HARIANY**

**01091003027**

**Akuntansi**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih*

*Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH PEMERINTAH KOTA  
PALEMBANG**

Disusun Oleh :


Nama : Dini Hariany  
NIM : 01091003027  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.


TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

01 Juni 2013

Ketua :   
Ahmad Subeki S.E., M.M., Ak.  
NIP. 196508161995121001

30 Mei 2013

Anggota :   
Abukosim S.E., M.M., Ak.  
NIP 196205071995121001

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

### ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

Disusun Oleh :

Nama : Dini Hariany  
NIM : 01091003027  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 24 Juni 2013 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif  
Inderalaya, 25 Juni 2013

Ketua,



Ahmad Subeki SE,MM,Ak  
NIP.196508161995121001

Anggota,



Drs. Burhanuddin M. Acc, Ak  
NIP. 195808281988101001

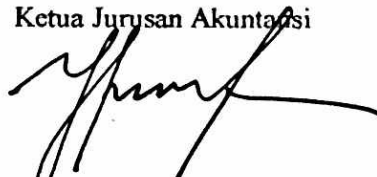
Anggota,



Mukhtaruddin SE, M. Si, Ak  
NIP. 196712101994021001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Ahmad Subeki SE,MM,Ak  
NIP.196508161995121001

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Dini Hariany  
NIM : 01091003027  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul :  
Analisis Efektivitas Pajak Daerah Pemerintah Kota Palembang

Pembimbing :

Ketua : Ahmad Subeki S.E., M.M., Ak.

Anggota : Abukosim S.E., M.M., Ak.

Tanggal Ujian : 24 Juni 2013

adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Inderalaya, 25 Juni 2013

Pembuat Pernyataan,



Dini Hariany

NIM. 01091003027

*"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib  
suatu kaum kecuali kaum itu sendiri  
yang mengubah apa-apa yang  
pada diri mereka" (Q.S Ar-Ra'd: 11)*

*Ku persembahkan untuk:*

*Kedua Orangtuaku, yaitu Ayah dan Ibu tercinta*

*Kakak-kakakku tersayang*

*Dosen-dosenku*

*Sahabat-Sahabatku dan*

*Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas Pajak Daerah Pemerintah Kota Palembang”. Penulisan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab, yaitu : Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, serta Bab V Kesimpulan dan Saran.

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Skripsi ini membahas mengenai efektivitas pajak daerah termasuk upaya pajak serta klasifikasi potensi dari masing-masing jenis pajak daerah dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah kota Palembang. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, M.B.A selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof. Dr. H. Taufiq Marwah, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Ahmad Subeki S.E., M.M., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, sekaligus Pembimbing I Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam menulis skripsi ini.
4. Abukosim S.E., M.M., Ak selaku Pembimbing II Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama proses penulisan skripsi ini.
5. Drs. H. Harun Delamat M.Si., Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh dosen yang telah membagi ilmu pengetahuan dan nasihatnya selama penulis menimba ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. Seluruh staf di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

8. Ibu Ely Dalty S.H., M.Si dan staf pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang telah banyak memberikan bantuan selama melakukan penelitian.
9. Ayah dan Ibu tercinta yang selama ini selalu mendo'akan dan memberikan semangat serta motivasi.
10. Ketiga saudaraku yang selalu memberikan semangat dan bantuan serta keponakan-keponakanku yang selalu menghibur dan memberikan keceriaan.
11. Semua guru-guruku yang telah memberikan ilmu dan nasehat serta tauladan.
12. Semua teman semasa penulis duduk di bangku sekolah, terutama teman-teman terdekatku dari kecil yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
13. Seluruh teman-teman Ak'09 (terutama Tika, Rina, Maya, Septi, Herita, Qouli, dan Amir) yang telah sama-sama berjuang dan berusaha untuk menyelesaikan studi dengan baik dan terima kasih atas kebersamaan selama ini yang tak akan pernah penulis lupakan.

Inderalaya, 25 Juni 2013

Penulis

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

Oleh :  
Dini Hariany

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pajak termasuk menganalisis upaya pajak dari masing-masing jenis pajak daerah serta mengetahui bagaimana potensi pajak daerah dengan mengklasifikasikannya menjadi empat klasifikasi, yaitu prima, potensial, berkembang, dan terbelakang berdasarkan rasio proporsi dan rasio tambahan pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak menunjukkan rata-rata sebesar 105,79 persen. Upaya pajak yang terdiri dari elastisitas pajak menunjukkan rata-rata sebesar 0,19 persen dan rasio pajak menunjukkan rata-rata sebesar 0,65 persen. Terdapat dua jenis pajak daerah yang termasuk klasifikasi potensial, empat pajak daerah termasuk klasifikasi berkembang, dan satu jenis pajak daerah yang masih termasuk ke dalam klasifikasi terbelakang.

Kata kunci : Pajak daerah, efektivitas pajak, upaya pajak, dan potensi pajak.



## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF EFFECTIVENESS OF PALEMBANG GOVERMENT'S LOCAL TAX**

*Compiled by :*  
Dini Hariany

*Guided by :*  
Ahmad Subeki S.E., M.M., Ak.  
Abukosim S.E., M.M., Ak

*This research aims to know how tax effectiveness of each type of local taxes including tax effort and to know how the potential of local taxes by classifying into four classifications, namely prime, potential, developed, and underdeveloped based on the ratio of proportions and ratio of additional growth. The results showed that tax effectiveness shows an average of 105.79 percent. The tax effort that consists of tax elasticity shows an average of 0.19 percent and a tax ratio shows an average of 0.65 percent. There are two types of local taxes including potential classification, four types of local taxes including developed classification, and one type of local taxes including underdeveloped classification.*

*Keywords : local tax, tax effectiveness, tax effort, and tax potency.*

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama Mahasiswa : Dini Hariany  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 25 Juni 1991  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat Rumah (Orangtua) : Jalan Sukabangun II No.1535 Rt.26 Rw.04  
Kecamatan: Sukarami Kelurahan: Sukabangun  
Palembang 30151  
Alamat Email : rianyidini@yahoo.co.id

Pendidikan Formal :

Sekolah Dasar : SD Negeri 72 Palembang  
SMP : SMP Negeri 46 Palembang  
SMA : SMA Negeri 17 Palembang

Pendidikan Non Formal : LBPP LIA Palembang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori .....	9
2.1.1 Pajak.....	9
2.1.2 Pajak Daerah .....	11
2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah .....	11
2.1.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah .....	13
2.1.2.3 Pemungutan Pajak Daerah.....	22
2.1.3 Efektivitas Pajak ( <i>Tax Effectiveness</i> ).....	23

2.1.4 Upaya Pajak ( <i>Tax Effort</i> ) .....	24
2.2 Penelitian Terdahulu .....	26
2.3 Kerangka Pemikiran.....	28
2.4 Hipotesis.....	29
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Ruang Lingkup Penelitian .....	30
3.2 Sumber Data dan Jenis Data.....	30
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	31
3.4 Metode Analisis Data.....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian.....	36
4.1.1 Efektivitas Pajak ( <i>Tax Effectiveness</i> ).....	39
4.1.2 Upaya Pajak ( <i>Tax Effort</i> ) .....	48
4.1.3 Klasifikasi Potensi Pajak Daerah Kota Palembang .....	64
4.2 Pembahasan .....	72
4.2.1 Efektivitas Pajak ( <i>Tax Effectiveness</i> ).....	72
4.2.2 Upaya Pajak ( <i>Tax Effort</i> ) .....	78
4.2.3 Klasifikasi Potensi Pajak Daerah Kota Palembang .....	82
4.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang.....	89
4.2.5 Upaya-Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang.....	91
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan.....	93
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	94
5.3 Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2007-2011 .....	4
Tabel 3.1	Kategori Efektivitas .....	33
Tabel 3.2	Rumus Untuk Klasifikasi Jenis Pajak .....	34
Tabel 4.1	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2007-2011 .....	38
Tabel 4.2	Efektivitas Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2007-2011 .....	40
Tabel 4.3	Efektivitas Pajak Hotel Kota Palembang Tahun 2007-2011 .....	42
Tabel 4.4	Efektivitas Pajak Restoran Kota Palembang Tahun 2007-2011 .....	42
Tabel 4.5	Efektivitas Pajak Hiburan Kota Palembang Tahun 2007-2011 .....	43
Tabel 4.6	Efektivitas Pajak Reklame Kota Palembang Tahun 2007-2011 .....	44
Tabel 4.7	Efektivitas Pajak Penerangan Jalan (PLN dan Non-PLN) Kota Palembang Tahun 2007-2011 .....	45
Tabel 4.8	Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Palembang Tahun 2007-2011 .....	46
Tabel 4.9	Efektivitas Pajak Parkir Kota Palembang Tahun 2007-2011 .....	47
Tabel 4.10	Produk Domestik Regional Bruto Kota Palembang Tahun 2007-2011 .....	48
Tabel 4.11	Elastisitas Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2007-2011 .....	50
Tabel 4.12	Elastisitas Pajak Hotel Kota Palembang Tahun 2007-2011 .....	51
Tabel 4.13	Elastisitas Pajak Restoran Kota Palembang Tahun 2007-2011 .....	51
Tabel 4.14	Elastisitas Pajak Hiburan Kota Palembang Tahun 2007-2011 .....	52
Tabel 4.15	Elastisitas Pajak Reklame Kota Palembang Tahun 2007-2011 .....	53

Tabel 4.16 Elastisitas Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang	
Tahun 2007-2011 .....	54
Tabel 4.17 Elastisitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
Kota Palembang Tahun 2007-2011 .....	55
Tabel 4.18 Elastisitas Pajak Parkir Kota Palembang Tahun 2007-2011 .....	56
Tabel 4.19 Rasio Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2007-2011 .....	57
Tabel 4.20 Rasio Pajak Hotel Kota Palembang Tahun 2007-2011 .....	58
Tabel 4.21 Rasio Pajak Restoran Kota Palembang Tahun 2007-2011 .....	59
Tabel 4.22 Rasio Pajak Hiburan Kota Palembang Tahun 2007-2011 .....	60
Tabel 4.23 Rasio Pajak Reklame Kota Palembang Tahun 2007-2011 .....	61
Tabel 4.24 Rasio Pajak Penerangan Jalan (PLN dan Non-PLN)	
Kota Palembang Tahun 2007-2011 .....	62
Tabel 4.25 Rasio Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
Kota Palembang Tahun 2007-2011 .....	63
Tabel 4.26 Rasio Pajak Parkir Kota Palembang Tahun 2007-2011 .....	64
Tabel 4.27 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang	
Tahun 2007-2008 .....	66
Tabel 4.28 Pertumbuhan, Rasio Proporsi, dan Rasio Tambahan Pajak Daerah	
Kota Palembang Tahun 2007-2008 .....	67
Tabel 4.29 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang	
Tahun 2008-2009 .....	68
Tabel 4.30 Pertumbuhan, Rasio Proporsi, dan Rasio Tambahan Pajak Daerah	
Kota Palembang Tahun 2008-2009 .....	68
Tabel 4.31 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang	
Tahun 2009-2010 .....	69

Tabel 4.32	Pertumbuhan, Rasio Proporsi, dan Rasio Tambahan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2009-2010 .....	70
Tabel 4.33	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2010-2011 .....	71
Tabel 4.34	Pertumbuhan, Rasio Proporsi, dan Rasio Tambahan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2010-2011 .....	72
Tabel 4.35	Perkembangan Klasifikasi Potensi Pajak Hotel Tahun 2007-2011 ...	83
Tabel 4.36	Perkembangan Klasifikasi Potensi Pajak Restoran Tahun 2007-2011 .....	84
Tabel 4.37	Perkembangan Klasifikasi Potensi Pajak Hiburan Tahun 2007-2011 .....	85
Tabel 4.38	Perkembangan Klasifikasi Potensi Pajak Reklame Tahun 2007-2011 .....	86
Tabel 4.39	Perkembangan Klasifikasi Potensi Pajak Penerangan Jalan (PLN dan Non-PLN) Tahun 2007-2011 .....	86
Tabel 4.40	Perkembangan Klasifikasi Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2007-2011 .....	87
Tabel 4.41	Perkembangan Klasifikasi Potensi Pajak Parkir Tahun 2007-2011 ..	88

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2007.....	99
Lampiran 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2008.....	100
Lampiran 3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2009.....	101
Lampiran 4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2010.....	102
Lampiran 5 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2011.....	103
Lampiran 6 Produk Domestik Regional Bruto Kota Palembang Tahun 2007-2011.....	104



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka setiap daerah diberikan hak dan wewenang untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri termasuk urusan pendapatan daerah dan pembiayaan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi tentunya memerlukan sumber penerimaan daerah yang terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan untuk membiayai segala urusan pemerintahan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu pendapatan daerah yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber dana kemandirian daerah yang digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif, namun tarif tersebut tetap tidak boleh melebihi tarif maksimum yang ditetapkan undang-undang. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka pemerintah daerah dapat lebih menggali potensi penerimaan pajak daerah yang nantinya dapat meningkatkan kemandirian daerah.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya (Haris, 2010). Salah satu sumber keuangan daerah adalah pajak daerah yang harus terus digali guna meningkatkan kemandirian suatu daerah.

Palembang yang merupakan salah satu kota yang melaksanakan otonomi daerah dan sebagai daerah penyangga Ibukota Republik Indonesia tentunya harus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Sebagai kota metropolitan dan sebagai akibat adanya perkembangan ekonomi, banyak sekali terdapat usaha-usaha di

Palembang yang merupakan objek pajak daerah yang merupakan sumber potensi yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pertumbuhan penerimaan pajak daerah dapat ikut meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber dana bagi kemandirian daerah. Kota Palembang sendiri sampai dengan tahun 2011 telah memiliki sebelas jenis pajak daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PLN dan Non-PLN), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Besaran pokok pajak bagi wajib pajak daerah dan tarif pajak untuk setiap jenis pajak daerah ditentukan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan bahwa bagi wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang ketentuan tata cara pembukuan atau pencatatan tersebut diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka setiap wajib pajak yang omzet usahanya Rp.300.000.000,00 atau lebih wajib membuat pembukuan atau pencatatan atau dengan kata lain menyusun laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (PSAK revisi 2009). Pembukuan atau pencatatan yang dibuat oleh wajib pajak yang dimaksud tersebut merupakan informasi bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan pajak atau besarnya pajak yang terutang bagi wajib pajak.

Selama beberapa tahun terakhir ini realisasi penerimaan pajak daerah kota Palembang mengalami peningkatan. Berikut tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah kota Palembang (dalam Rupiah) yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang :

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2007-2011**

Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah
2007	51.475.000.000,00	51.486.867.607,06
2008	69.350.000.000,00	69.367.592.779,00
2009	87.485.932.360,00	84.696.563.176,60
2010	93.420.835.800,00	104.047.313.437,00
2011	172.117.431.035,00	207.746.349.410,40
2012	287.152.544.690,00	333.104.821.406,80

Sumber : Dispenda kota Palembang

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2007 sampai dengan 2012 selalu melebihi target yang ditetapkan, kecuali pada tahun 2009 realisasi penerimaan pajak daerah tidak melebihi target yang telah ditetapkan. Jika dilihat, maka tabel tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah pemerintah kota Palembang masuk kedalam kategori baik (efektif) karena rata-rata telah mencapai target yang ditetapkan bahkan lebih. Namun, Enggar, Rahayu, dan Wahyudi (2011) mengungkapkan bahwa pemungutan pajak daerah harus mampu menekan biaya yang dikeluarkan dan kebocoran-kebocoran yang terjadi di lapangan serendah

mungkin sehingga manfaat yang didapatkan akan jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.

Penelitian ini memfokuskan analisis pada salah satu sumber dana pemerintah daerah, yaitu pajak daerah dengan menganalisis efektivitas pajak termasuk upaya pajak serta bagaimana klasifikasi potensi masing-masing jenis pajak daerah agar dapat dilakukan tindakan yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah kedepannya termasuk dengan terus menggali potensi pajak daerah yang sebenarnya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Pajak Daerah Pemerintah Kota Palembang”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana efektivitas pajak daerah pemerintah kota Palembang ?
- b. Bagaimana upaya pajak daerah pemerintah kota Palembang ?
- c. Bagaimana klasifikasi potensi masing-masing jenis pajak daerah kota Palembang ?
- d. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah kota Palembang ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pajak daerah pemerintah kota Palembang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya pajak daerah pemerintah kota Palembang.
- c. Untuk mengetahui bagaimana klasifikasi potensi masing-masing jenis pajak daerah kota Palembang.
- d. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah kota Palembang.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

- a. Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang  
Dapat memberikan masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang dalam menjaga dan meningkatkan efektivitas pajak daerah pemerintah kota Palembang.
- b. Akademik  
Dapat memberikan sumbangan karya ilmiah dan referensi bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian di bidang yang sama.
- c. Penulis  
Dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan yang baru mengenai efektivitas pajak.

#### d. Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan dan informasi mengenai efektivitas pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat.

### **1.5. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah yang ingin dibahas, tujuan penelitian, dan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat tentang berbagai teori dan konsep yang mendukung penelitian, kesimpulan dari penelitian-penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran yang menggambarkan pola pikir penelitian ini serta hipotesis yang merupakan dugaan sementara hasil penelitian ini.

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini memuat tentang ruang lingkup penelitian, sumber data dan jenis data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat tentang analisis efektivitas pajak daerah pemerintah kota Palembang termasuk upaya pajak yang dilakukan penulis untuk tahun 2007 sampai dengan 2011 dan klasifikasi potensi dari masing-masing jenis pajak daerah, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah kota Palembang, hambatan-hambatan, dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat tentang kesimpulan, keterbatasan, dan saran yang diberikan penulis dari hasil analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Wakhid. 2010. Fungsi Pajak dan Tax Ratio. Diambil pada tanggal 02 Mei 2013 dari <http://aanwakhidansori.blogspot.com/2010/06/peradilan-pajak.html>.
- Astri, Wilis Windar. 2009. Pajak Daerah Pasca Pengesahan UU No.28 Tahun 2009 : Potensi dan Tantangan. Diambil pada tanggal 01 Mei 2013 dari <http://gitacintanyawilis.blogspot.com/2009/11/normal-0-false-false-false-style.html>.
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
- Enggar, Sri Rahayu, dan I Wahyudi. 2011. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Propinsi Jambi (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jambi). Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Vol.13 No.1. Diambil pada tanggal 29 September 2012 dari <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/humaniora/article/view/87/74>.
- Haris, Deden Muhammad. 2010. Analisis Kinerja dan Adminidtrasi Pajak Daerah Di Kabupaten Bogor. Jurnal Administrasi Publik, Vol.1 No.2. Diambil pada tanggal 30 April 2013 dari <http://ejurnal.fisip-untirta.ac.id/index.php/JAP/article/view/61/52>.
- Juri, Mat. 2012. Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda. Jurnal Eksis, Vol.8 No.1. Diambil pada tanggal 30 September 2012 dari <http://karyailmiah.polnes.ac.id/Download-PDF/EKSIS-VOL.08-NO.1-APRIL-2012/no%2003%20-%20mat%20juri%20a%202020%20-%202031%20-%20ANALISIS%20KONTRIBUSI%20PAJAK%20DAERAH%20DAN%20RETRIBUSI%20DAERAH%20TERHADAP%20PENDAPATAN%20ASLI%20DAERAH%20%28PAD%29%20KOTA%20SAMARINDA.pdf>.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Revisi 2009

S, Kristina. 2005. Analisis Kinerja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sragen. *Spirit Publik*, Vol.1 No.2. Diambil pada tanggal 30 April 2013 dari [http://perpustakaan.uns.ac.id/jurnal/index.php?act=view&id=1\\_la&aid=267&Spirit%20Publik](http://perpustakaan.uns.ac.id/jurnal/index.php?act=view&id=1_la&aid=267&Spirit%20Publik).

Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suwarno, Agus Endro dan Suhartiningsih. 2008. Efektivitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol.7 No.2. Diambil pada tanggal 29 September 2012 dari [http://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/842/06-Agus%20Endro%20\\_162-173\\_.pdf?sequence=1](http://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/842/06-Agus%20Endro%20_162-173_.pdf?sequence=1).

Syahputra, Adi. 2006. *Perpajakan*. Diambil pada tanggal 02 Mei 2013 dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1185/1/06002656.pdf>.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Wijaya, Erikson. 2012. Rasio Pajak, Dilema antara PNB dan PDB. Diambil pada tanggal 02 Mei 2013 dari <http://www.pajak.go.id/content/article/rasio-pajak-dilema-antara-pnb-dan-pdb>.